

MAKALAH AKUTANSI KEUANGAN MENENGAH

ASET TAK BERWUJUD

Dosen Pengampu :

Dr. Pujiati S.Pd., M.Pd.

Galuh Sandi S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh : Kelompok 5

- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Shafa Djiana Wardani | : | 2413031080 |
| 3. Natasya | : | 2413031081 |
| 4. Rulla Alifah | : | 2413031093 |
| 5. M. Dzaki Rizkia | : | 2053031004 |

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya penyusun dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai dengan harapan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Pujiati S.Pd., M.Pd. Dan Bapak Galuh Sandi S.Pd., M.Pd. Sebagai dosen pengampu mata kuliah Akutansi Keuangan Menengah yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan makalah ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami. Maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga apa yang ditulis dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan	2
BAB 2 PEMBAHASAN	3
A. Definisi Aset Tak Berwujud	3
B. Kriteria Utama Pengakuan Aset Tak Berwujud.....	4
C. Pengukuran Biaya Perolehan Aset Tak Berwujud.....	5
D. Macam-Macam Aset Tak Berwujud.....	7
E. Pengukuran Aset Tak Berwujud Setelah Perolehan.	9
BAB 3 PENUTUP.....	10
A. Kesimpulan dan saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia akuntansi terdapat istilah asset tak berwujud yang memiliki perbedaan dan fungsi yang berbeda beda. Dan pada perusahaan pasti terdapat asset berwujud dan asset tak berwujud. Di Indonesia perusahaan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan globalisasi, inovasi teknologi serta persaingan yang ketat ini membuat perusahaan-perusahaan berubah dari bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja menuju bisnis berdasarkan pengetahuan , hal ini menuntut setiap perusahaan untuk lebih professional . dan bertambahnya pesaing di setiap saat, baik pesaing yang berorientasi lokal maupun pesaing yang berorientasi internasional mengharuskan setiap perusahaan menampilkan yang terbaik , baik dalam segi kinerja perusahaan juga harus ditunjang dengan strategi yang matang dalam segala segi. Peran asset tidak berwujud memiliki peran yang bermacam-macam, salah satunya itu adalah sektor barang konsumsi.

Menurut PSAK 19 aset tidak berwujud adalah asset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan pendapatan . Aset tidak berwujud salah satunya adalah merek atau brand dari sebuah produk dan merek atau produk digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Citra reputasi juga merupakan asset tak berwujud perusahaan yang juga dapat berkontribusi meningkatkan nilai perusahaan dengan demikian informasi nilai asset tidak berwujud merupakan sinyal positif bagi investor. Asset tidak berwujud memiliki peran penting dalam mencapai tujuan dan strategi perusahaan serta dalam menentukan nilai pasar perusahaan. Asset tidak berwujud memiliki banyak manfaat bagi perusahaan. Dengan demikian asset tidak berwujud adalah alat untuk meningkatkan nilai dari suatu perusahaan.

Dalam makalah ini akan dibahas mengenai asset tak berwujud mulai dari definisinya sampai dengan cara pengukuran biaya asset tak berwujud serta penghitungan Amortisasi, Serta Penentuan Umur Manfaat dan Nilai Sisa Aset Tak Berwujud.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka dapat di ketahui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Jelaskan apa yang dimaksud asset tak berwujud?
2. Apa saja Kriteria Utama Pengakuan Aset Tak Berwujud?
3. Bagaimana proses Pengukuran Biaya Perolehan Aset Tak Berwujud?
4. Sebutkan Macam-macam Aset Tak Berwujud?
5. Bagaimana pengukuran asset tak berwujud setelah perolehan?

C. Tujuan

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka dapat di ketahui tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Mengetahui definisi asset tak berwujud.
2. Mengetahui Kriteria Utama Pengakuan Aset Tak Berwujud.
3. Mengetahui proses Pengukuran Biaya Perolehan Aset Tak Berwujud.
4. Mengetahui Macam Macam Aset Tak Berwujud.
5. Mengetahui pengukuran asset tak berwujud setelah .

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Aset Tak Berwujud

Definisi aset tak berwujud berdasarkan PSAK No.19 adalah asset moneter yang teridentifikasi tanpa bentuk fisik, dan dalam PSAK No.19 paragraf 10 menyatakan bahwa dari definisi yang ada terdapat 3 kriteria utama bagi aset tak berwujud yaitu dalam paragraph 11 PSAK No.19 dinyatakan bahwa keteridentifikasian aset tak berwujud harus dapat dibedakan secara jelas dengan *goodwill*. Perbedaan paling jelas adalah bahwa goodwill terjadi akibat proses penggabungan usaha berbentuk akuisisi manfaat ekonomis yang diharapkan timbul dari sinergi antara asset yang diperoleh yang dapat diidentifikasi atau dari asset, yang secara individual, tidak memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan dapat dibedakan secara jelas dengan goodwill jika asset tersebut dapat dipisahkan dan jika perusahaan dapat disewakan, menjual, menukarkan atau mendistribusikan manfaat ekonomis masa depan yang terdapat pada asset tersebut tanpa melepaskan manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari asset lain yang digunakan dalam aktivitas yang sama dalam menghasilkan pendapatan.

Perusahaan disebut mengendalikan suatu asset, jika perusahaan memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan timbul dari asset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonominya. Kemampuan perusahaan untuk mengendalikan manfaat ekonomis masa depan dapat timbul dari pengetahuan atas pasar atau pengetahuan teknis. Perusahaan mengendalikan manfaat ekonomis tersebut jika misalnya perusahaan memiliki satu pengetahuan yang dilindungi oleh hak hukum, seperti hak cipta dan pembatasan perjanjian dagang oleh kewajiban hukum sebagai pegawai untuk menjaga kerahasiaan. Manfaat ekonomis masa depan timbul dari asset tak berwujud dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang dan jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan asset tersebut oleh perusahaan, misalnya penggunaan hal kekayaan intelektual dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa depan, tetapi menekan biaya produksi masa depan.

B. Kriteria aset tak berwujud

Rahayu, P., & Septian, H. (2020). Pengakuan aset tak berwujud dalam laporan keuangan hanya dapat dilakukan jika memenuhi sejumlah kriteria utama. Kriteria ini berfungsi untuk memastikan bahwa perusahaan tidak keliru dalam mencatat suatu

pengeluaran atau hak yang sebenarnya belum layak dikategorikan sebagai aset.

1. aset tak berwujud harus dapat diidentifikasi secara terpisah dari aset lainnya. Hal ini berarti aset tersebut dapat dikenali dan dibedakan dengan jelas, baik karena memiliki fungsi tersendiri maupun manfaat yang spesifik bagi entitas. Contohnya, perangkat lunak akuntansi yang dibeli perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud karena secara langsung digunakan dalam proses pencatatan dan pengelolaan keuangan.
2. aset tak berwujud harus berada di bawah kendali perusahaan. Kendali ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki hak penuh untuk menggunakan, mengatur, serta memperoleh manfaat dari aset tersebut, dan dapat membatasi pihak lain agar tidak menggunakannya tanpa izin. Misalnya, perusahaan yang memiliki lisensi atau hak cipta tertentu berhak memanfaatkan aset tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sementara pihak lain tidak memiliki hak yang sama.
3. Aset tak berwujud wajib memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Artinya, aset tersebut dapat menambah nilai atau memberikan keuntungan bagi perusahaan di periode mendatang. Contohnya, merek dagang yang sudah dikenal luas dapat menarik lebih banyak konsumen, sedangkan sistem informasi digital mampu meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya operasional. Dengan demikian, aset tak berwujud diharapkan benar-benar memberikan kontribusi terhadap kegiatan dan pendapatan perusahaan di masa depan.
4. Biaya perolehan aset harus dapat diukur dengan andal. Nilai perolehan harus dapat ditentukan secara pasti, baik melalui harga beli, biaya pengembangan, maupun nilai wajar yang disepakati. Apabila biaya perolehannya tidak dapat diukur secara tepat, maka aset tersebut tidak boleh diakui sebagai aset tak berwujud, tetapi harus dicatat sebagai beban pada periode terjadinya.

Jika keempat persyaratan tersebut terpenuhi, maka suatu aset dapat diakui secara sah sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan. Pengakuan ini penting karena memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai dan posisi keuangan perusahaan. Selain itu, pencatatan aset tak berwujud yang benar juga membantu dalam proses perhitungan amortisasi, penentuan pajak, serta penilaian kinerja keuangan secara keseluruhan. Kesimpulannya, pengakuan aset tak berwujud bukan sekadar mencatat aset yang tidak memiliki bentuk fisik, melainkan harus berdasarkan kriteria tertentu agar

informasi dalam laporan keuangan tetap relevan dan dapat dipercaya. Dengan menerapkan ketentuan yang diatur dalam PSAK 19, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

C. Proses Pengukuran Biaya Perolehan Aset Tak Berwujud

Pengukuran biaya perolehan aset tak berwujud (ATB) merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan seluruh biaya yang benar-benar dikeluarkan serta memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Menurut Rosdiana dan Anggraita (2024), proses pengukuran ATB dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan.

1. Tahap Penganggaran

Pada tahap ini, instansi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dengan menetapkan akun belanja dan jumlah anggaran yang sesuai. Prinsip kapitalisasi diterapkan sejak awal dengan mengacu pada konsep biaya perolehan penuh (full costing), yang mencakup seluruh biaya pengadaan barang atau jasa sebagai bagian dari nilai aset. Penentuan akun belanja harus mematuhi PMK No. 62 Tahun 2023, agar hanya pengeluaran yang memenuhi kriteria aset yang dapat dikapitalisasi. Selain itu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran guna mendukung ketepatan pengukuran biaya perolehan ATB.

2. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Tahap pelaksanaan merupakan proses pencatatan dan kapitalisasi biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan aset tak berwujud. Pencatatan dilakukan melalui aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dengan memuat informasi seperti akun belanja, nilai biaya perolehan, kodefikasi, serta dokumen pendukung (BAST). Biaya-biaya yang memenuhi kriteria kapitalisasi—seperti biaya kontraktual, pengembangan, dan pengeluaran langsung lainnya dicatat sebagai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan (ATB-DP). Setelah pekerjaan selesai, ATB-DP direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud Data dan Informasi Geospasial. Jika terjadi kesalahan dalam kapitalisasi, maka dilakukan koreksi nilai aset untuk mencegah terjadinya kesalahan pencatatan baik kelebihan maupun kekurangan nilai.

3. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan, dilakukan proses pendetailan dan validasi data aset di aplikasi SAKTI berdasarkan dokumen perolehan yang tersedia. Operator, validator, dan approver memastikan seluruh transaksi telah sesuai dengan pedoman pengakuan dan pengukuran aset. Apabila terdapat pengembalian belanja atau kekeliruan kapitalisasi, dilakukan penyesuaian melalui jurnal koreksi agar nilai aset benar-benar mencerminkan biaya perolehannya. Proses ini diakhiri dengan rekonsiliasi otomatis dan penutupan buku, sehingga nilai ATB yang tercantum dalam laporan keuangan menggambarkan kondisi sebenarnya sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan.

Secara keseluruhan, proses pengukuran biaya perolehan aset tak berwujud mencakup kegiatan identifikasi, kapitalisasi, validasi, dan penyesuaian atas seluruh pengeluaran yang memenuhi kriteria aset. Tahapan ini memastikan nilai ATB yang dilaporkan bersifat tepat, andal, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

D. Macam-Macam Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud (intangible asset) adalah hak, keistimewaan, dan manfaat kepemilikan atau pengendalian yang tidak memiliki wujud fisik. Ciri utama aset tak berwujud adalah tingginya ketidakpastian masa manfaat dan tidak adanya bentuk fisik. Aset ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi (identifiable intangible asset) dan aset tak berwujud yang tidak teridentifikasi (unidentifiable intangible asset). Contoh aset tak berwujud antara lain ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan, paten, merek dagang, dan sistem operasi yang menjadi komponen terbesar dari nilai perusahaan. Selain itu, aset tak berwujud juga meliputi biaya pendirian perusahaan atau beban yang ditangguhkan. (Perabawati et al., 2018)

Aset tak berwujud memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai perusahaan dan kinerja keuangan. Semakin tinggi nilai aset tak berwujud yang dimiliki, maka nilai perusahaan cenderung meningkat, yang mencerminkan persepsi positif investor terhadap perusahaan tersebut. Pengelolaan aset tak berwujud yang baik dapat menciptakan keunggulan kompetitif dalam era bisnis yang berbasis pengetahuan dan teknologi, di mana aset fisik mulai tergeser oleh aset non-fisik yang bernilai strategis.

Dengan demikian, pemahaman dan pengelolaan jenis-jenis aset tak berwujud sangat penting dalam akuntansi keuangan menengah untuk menggambarkan nilai sebenarnya dari perusahaan serta memberikan gambaran yang akurat terhadap posisi keuangan dan prospek perusahaan.

Macam-macam aset tak berwujud memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan sifat dan manfaatnya dalam aktivitas perusahaan. Berikut penjelasan tentang beberapa jenis aset tak berwujud utama:

1. Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atau pemegang hak untuk memproduksi, menggunakan, atau menjual penemuan teknologi atau produk dalam jangka waktu tertentu. Paten memberikan perlindungan hukum terhadap peniruan dan dimanfaatkan untuk melindungi inovasi perusahaan yang bersifat teknis dan baru.

2. Merek Dagang (*Trademark*)

Merek dagang adalah simbol, nama, atau logo yang digunakan perusahaan untuk membedakan produk atau jasanya dari produk kompetitor. Fungsi utama merek dagang adalah membangun loyalitas pelanggan dan mendukung strategi pemasaran perusahaan. Merek ini memiliki nilai ekonomi karena dapat meningkatkan penjualan dan pengenalan produk.

3. Franchise

Franchise adalah hak untuk menggunakan nama dagang, sistem bisnis, dan dukungan perusahaan induk dalam menjalankan usaha. Melalui franchise, penerima hak memperoleh manfaat dari reputasi dan sistem usaha yang sudah teruji, sehingga mempercepat proses ekspansi bisnis.

4. Ilmu Pengetahuan dan Hak Cipta (*Copyright*)

Hak cipta melindungi karya-karya asli seperti tulisan, musik, perangkat lunak, dan karya seni lainnya. Ini memberi hak eksklusif bagi pencipta untuk mengontrol penggunaan dan distribusi ciptaan mereka, sehingga mendukung kreativitas dan inovasi intelektual perusahaan.

5. Sistem Operasi dan *Software*

Software atau perangkat lunak adalah program komputer yang dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. *Software* yang dikembangkan atau dibeli memiliki nilai sebagai aset yang membantu proses bisnis, otomasi, dan penyimpanan data.

6. *Goodwill*

Goodwill merupakan nilai reputasi perusahaan, hubungan pelanggan, loyalitas, dan faktor-faktor yang tidak berwujud yang memperkuat posisi perusahaan dalam pasar. *Goodwill* muncul saat perusahaan diakuisisi dengan harga lebih tinggi dari nilai tercatat aset berwujud dan tak berwujud lainnya.

7. Biaya Pendirian Perusahaan (*Organizational Costs*)

Ini adalah biaya yang dikeluarkan saat mendirikan perusahaan, mencakup biaya legal, perizinan, dan pemasaran awal. Biaya ini dianggap memiliki manfaat jangka panjang karena mendukung kelancaran operasional awal perusahaan.

8. Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development*)

Biaya riset dan pengembangan yang dikeluarkan untuk menciptakan produk baru atau meningkatkan produk lama termasuk aset tak berwujud jika memenuhi kriteria aktivasi. Aset ini mencerminkan inovasi dan keberlanjutan perusahaan dalam persaingan.

E. Pengukuran Aset Tak Berwujud Setelah Perolehan

Pengukuran aset tak berwujud setelah perolehan dapat dilakukan dengan dua model yang diatur dalam standar akuntansi keuangan menengah. Model pertama adalah model biaya perolehan (*cost model*), di mana setelah pengukuran awal, aset tak berwujud dinilai berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Model kedua adalah model revaluasi (*revaluation model*), di mana aset tak berwujud setelah pengukuran awal dinilai berdasarkan nilai wajar dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Namun, model revaluasi hanya dapat diterapkan apabila nilai wajar dapat ditentukan dengan andal dan mengacu pada pasar aktif, yaitu pasar di mana aset tersebut diperdagangkan secara homogen dengan harga tersedia untuk publik. (Muhammad Syakib et al., 2021)

Selain itu, amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan metode garis lurus selama masa manfaat ekonomis aset tersebut, dengan periode amortisasi tidak boleh lebih dari 40 tahun untuk menjaga rasionalitas penghapusan nilai aset tersebut. Jika aset tak berwujud dihentikan atau tidak digunakan lagi, nilai buku aset tersebut dihapuskan dari pembukuan, dan laba atau rugi penghentian dicatat.

Contoh Penghitungan Amortisasi:

Jika sebuah paten berharga Rp. 28.000 dengan masa manfaat 14 tahun, maka beban amortisasinya adalah Rp. 2.000. Dengan cara membagi Rp. 28.000 dengan 14, maka diperoleh beban amortisasi Rp. 2.000

Goodwill yang timbul secara internal tidak diakui sebagai aset tak berwujud karena tidak memenuhi kriteria pengakuan, seperti dasar pengukuran biaya perolehan yang andal, identifikasi terpisah, dan kendali oleh perusahaan. *Goodwill* hanya diakui dalam

kombinasi bisnis.

Pengukuran setelah perolehan ini bertujuan untuk mencerminkan nilai ekonomis aset tak berwujud secara wajar dalam laporan keuangan agar dapat memberikan gambaran yang akurat terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan.

STUDI KASUS

PT ABC memiliki aset takberwujud dalam bentuk izin operator taksi. Izin operator taksi tersebut sering diperdagangkan di antara operator taksi yang ada atau calon operator taksi. Izin operator taksi tersebut diperoleh pada tanggal 1 Januari 2013 dengan harga perolehan Rp200.000.000. Umur manfaat izin tersebut adalah 5 tahun dan entitas menggunakan metode garis lurus untuk mengamortisasinya. Pada tanggal 31 Desember 2015, nilai diperdagangkan izin operator taksi tersebut adalah Rp240.000.000 dan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2015 adalah Rp80.000.000.

JAWABAN:

Harga perolehan	Rp 200.000.000
Akumulasi amortisasi	(80.000.000)
Nilai tercatat	Rp 120.000.000
Nilai wajar	240.000.000
Selisih revaluasi	Rp 120.000.000

Ayat jurnal untuk mencatat revaluasi izin taksi tersebut:

Akumulasi amorasi izin operator taksi	Rp. 80.000.000
Izin operator taksi	Rp. 80.000.000
Izin operator taksi	Rp 120.000.000
Selisih penilaian kembali asset tak berwujud	Rp. 120.000.000

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Aset tak berwujud merupakan aset non-fisik yang memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan dan berperan penting dalam meningkatkan nilai serta daya saing bisnis. Berdasarkan PSAK 19, aset ini diakui jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu dapat diidentifikasi secara jelas, berada di bawah kendali perusahaan, memberikan manfaat ekonomi di masa depan, dan memiliki biaya perolehan yang dapat diukur dengan andal.

Proses pengakuan dan pengukurannya dilakukan secara hati-hati agar nilai yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya. Aset tak berwujud mencakup berbagai bentuk seperti paten, merek dagang, hak cipta, software, franchise, goodwill, serta hasil penelitian dan pengembangan.

Pengukuran setelah perolehan dapat dilakukan dengan model biaya atau model revaluasi, dan amortisasi diterapkan selama masa manfaat aset. Dengan pengelolaan yang tepat, aset tak berwujud tidak hanya menjadi komponen penting dalam laporan keuangan, tetapi juga menjadi sumber keunggulan kompetitif yang mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

Saran

Perusahaan sebaiknya memperhatikan pengelolaan dan pencatatan aset tak berwujud sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan nilai aset tetap relevan dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Selain itu, perusahaan juga perlu meningkatkan pemahaman sumber daya manusia dalam mengelola aset tak berwujud agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, serta daya saing perusahaan di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, P., & Septian, H. (2020). Pengakuan Aset Tak Berwujud dan Perbandingan Metode Garis Lurus Dengan Metode Saldo Menurun Dalam Menentukan Pajak Penghasilan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 242-257.
- Rosdiana, N., S., M., Anggraita, V. (2024). Proses Pengakuan dan Pengukuran Aset Tak Terwujud Data dan Informasi Geospasial: Kelemahan dan Kendala. *Jurnal Akuntansi Trisakti*. Vol. 11, No. 1.
- Perabawati, D., Veronika, E., Novia, J., Eryda, R., & Margaretha, F. (2018). Pengaruh Aset Tak Berwujud, Kebijakan Keuangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan. Relasi: *Jurnal Ekonomi*, Vol. XVII, No. 2, 56-82.
- Muhammad Syakib, Mariyam Raniyah, Bela Pratiwi, Sofi Ayuning Riska. (2021). Aset Tak Berwujud.